

PERANAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA

Sucipto

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk kedudukan pengadilan pajak pada sistem peradilan di Indonesia dalam tujuannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa pajak dan peranan pengadilan pajak sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam pembangunan bangsa melalui peningkatan pendapatan negara sektor pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan pemungutan pajak dalam hubungan dengan kewenangan negara seperti Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Kewajiban Pajak Mutlak, Teori Gaya Beli, Teori Gaya Pikul. Namun oleh peneliti teori yang paling pantas dipergunakan berkenaan dengan masalah penelitian ini adalah teori asuransi, dimana negara dalam menjalankan tugasnya, fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perorangan. Oleh karena itu negara bekerja atau bertindak sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara membayar premi, dan pembayaran pajak dapat dipandang sebagai premi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normative atau sering disebut penelitian hukum doctrinal.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Kedudukan pengadilan pajak dalam struktur kekuasaan kehakiman belum sejalan dengan semangat “satu atap” (one roof system) yang dianut sistem peradilan Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung, karena organisasi, administrasi dan keuangan masih berada dalam pengaruh eksekutif (Departemen Keuangan), dan dalam prakteknya kedudukan ini menyulitkan pengadilan pajak untuk mandiri sebagai suatu badan peradilan independen yang harus berfungsi melindungi kepentingan hukum wajib pajak secara adil terhadap penguasa (fiscus). Tugas dan fungsi peradilan pajak adalah memeriksa dan mengadili atau memutuskan sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya. Putusan adil dimaksud untuk menentukan kebenaran materiil yang sesuai dengan asas yang dianut peraturan perpajakan.

Saran yang disampaikan adalah struktur kedudukan pengadilan pajak perlu direformasi sesuai dengan semangat “satu atap” dengan menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan kepada Mahkamah Agung, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak khususnya Pasal 5 ayat (2) dan umumnya peraturan perundang-undangan perpajakan terkait perlu direvisi segera, diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kata Kunci : pajak

ROLE IN INCREASING INCOME TAX COURT OF THE STATE

Sucipto

Abstract

This research was conducted for the position of the tax court on the Indonesian judicial system in its purpose as a tax dispute resolution institutions and the role of the tax court as an institution that provides legal protection to the taxpayer in the nation's development through increasing the state income tax sector.

The theory used in this research is the theory with regard to tax collection in relation to the authority of the state such as Insurance Theory, Theory of Interest, Tax Liabilities Absolute Theory, Theory of Style Buy, Theory of Style Pikul. But by researchers as the most likely theory is used with respect to this research problem is the insurance theory, which states in their duties, functions, duties also include the protection of life and property of individuals. Therefore, the state work or act as an insurer. For the protection of the citizens to pay premiums, and tax payments can be viewed as a premium. The method used is a normative juridical research or often called doctrinal legal research.

The results of this study defined that Notch tax court within the structure of the judicial power is not in line with the spirit of "one-stop" (one roof system) adopted by the Indonesian judicial system culminating in the Supreme Court, for the organization, administration and finance are still under the influence of the executive (Ministry of Finance), and in practice this position makes it difficult for independent tax court as an independent judicial body that should serve to protect the legal interests of taxpayers are fair to the ruler (fiscus). Duties and functions of tax justice is to investigate and adjudicate or decide disputes submitted to it. The verdict is fair meant to determine the veracity of the material in accordance with the principles adopted tax regulations. Suggestions submitted is the structure of the seat of the court taxes need to be reformed in accordance with the spirit of "one-stop" by giving coaching organization, administration and finance to the Supreme Court, therefore, Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court in particular Article 5 (2) and general legislation related taxation needs to be revised soon, harmonized with Act No. 14 of 1985 as amended by Act No. 4 of 2004 on Judicial Power, and Law No. 5 of 2004 on the Supreme Court.

Keywords: taxes